

Community-Based Tourism sebagai Model Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Peluang, Tantangan, dan Strategi Pengembangan di Indonesia

Muhammad Rahmad¹, Syauqi Damar Radityo²

^{1,2}Institut Pariwisata Trisakti

muhammadrahmad@iptrisakti.ac.id ; syauqi.radityo@students.iptrisakti.ac.id

<https://orcid.org/0009-0007-1899-9480>

Abstrak

Community-Based Tourism (CBT) merupakan pendekatan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya wisata. Pendekatan ini menjadi alternatif terhadap model pariwisata berorientasi pasar yang sering kali menempatkan masyarakat lokal hanya sebagai penonton dalam pembangunan di wilayahnya sendiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran strategis CBT sebagai model pemberdayaan masyarakat, memetakan tantangan implementasinya, dan merumuskan strategi penguatan yang adaptif dengan konteks Indonesia. Pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kajian literatur sistematis diterapkan dengan menelaah 21 sumber bereputasi periode 2023–2026, dilengkapi studi kasus empat desa wisata unggulan: Nglanggeran (Yogyakarta), Penglipuran (Bali), Wae Rebo (Nusa Tenggara Timur), dan Pentingsari (Yogyakarta). Hasil kajian menunjukkan bahwa CBT mampu meningkatkan kemandirian ekonomi melalui penguatan UMKM lokal, memperkuat identitas budaya, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Tantangan utama mencakup keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketimpangan distribusi manfaat, ketergantungan pada bantuan eksternal, dan minimnya dukungan regulasi yang berpihak. Tiga strategi penguatan diidentifikasi: pendampingan komunitas dan pelatihan kewirausahaan, sinergi multipihak antar pemangku kepentingan, serta inovasi berbasis kearifan lokal. Kajian ini berkontribusi melalui kerangka analisis terintegrasi peluang-tantangan-strategi pengembangan CBT yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci: *community-based tourism; pemberdayaan masyarakat; desa wisata; pembangunan berkelanjutan; partisipasi lokal*

Abstract

Community-Based Tourism (CBT) is a sustainable tourism development approach that positions local communities as primary actors in planning, managing, and utilizing tourism resources. This approach offers an alternative to market-oriented tourism models that often relegate local communities to spectator roles in their own territorial development. This study aims to analyze CBT's strategic role as a community empowerment model, map its implementation challenges, and formulate adaptive strengthening strategies for the Indonesian context. A qualitative descriptive approach based on systematic literature review was applied, examining 21 reputable sources from 2023–2026, complemented by case studies of four leading tourism villages: Nglanggeran (Yogyakarta), Penglipuran (Bali), Wae Rebo (East Nusa Tenggara), and Pentingsari (Yogyakarta). The findings reveal that CBT enhances economic independence through strengthening local MSMEs, reinforces cultural identity, and expands community participation in development decision-making. Key challenges include limited

human resource capacity, unequal benefit distribution, dependence on external assistance, and minimal supportive regulation. Three strengthening strategies were identified: community mentoring and entrepreneurship training, multistakeholder synergy among partners, and innovation grounded in local wisdom. This study contributes through an integrated opportunity-challenge-strategy framework for sustainable and inclusive CBT development.

Keywords: *community-based tourism; community empowerment; tourism village; sustainable development; local participation*

Pendahuluan

Pariwisata sebagai sektor strategis telah menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sekitar 4%–5% pada 2024 dan menyerap lebih dari 13 juta tenaga kerja secara langsung dan tidak langsung. Namun, orientasi pembangunan pariwisata yang cenderung kapitalistik dan berpusat pada pertumbuhan ekonomi sering kali mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, masyarakat di sekitar destinasi wisata hanya berperan sebagai penonton dan tidak menikmati manfaat ekonomi maupun sosial secara langsung (Hariyadi et al., 2024; Asy'ari & Putra, 2023). Ketimpangan ini mencerminkan dominasi pendekatan berbasis pasar yang mengutamakan akumulasi modal dan investasi skala besar, ketimbang penguatan kapasitas masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.

Padahal, masyarakat lokal memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan destinasi wisata, baik dari sisi pelestarian budaya, pemanfaatan sumber daya alam, hingga pengelolaan aktivitas wisata yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Potensi ini mencakup kekayaan tradisi, kuliner, kesenian, serta praktik kearifan lokal yang dapat menjadi daya tarik utama dalam konsep pariwisata berbasis pengalaman (Prasetyo & Nararais, 2023; Wirata et al., 2023). Mariati et al. (2023) menambahkan bahwa pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan harus disertai partisipasi aktif komunitas dalam seluruh tahap perencanaan agar manfaat yang dihasilkan benar-benar inklusif. Sayangnya, kontribusi masyarakat sering kali tidak difasilitasi secara optimal dalam skema pembangunan pariwisata yang bersifat *top-down*. Ernawati dan Hananto (2023) mengingatkan bahwa agenda riset pariwisata digital di Indonesia perlu memberi perhatian lebih besar pada aspek tata kelola dan keterlibatan komunitas, bukan hanya pada teknologi atau perilaku konsumen.

Kondisi tersebut mendorong urgensi adopsi model pembangunan pariwisata yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. *Community-Based Tourism* (CBT) atau pariwisata berbasis komunitas hadir sebagai pendekatan yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan pariwisata, dengan tujuan tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi tetapi juga memperkuat kapasitas sosial dan budaya (Rahman et al., 2024). Setyawan et al. (2025) menambahkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui pendekatan komunitas terbukti efektif menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan, terutama pada kawasan dengan kekayaan budaya dan alam yang signifikan.

Meskipun riset tentang CBT di Indonesia berkembang, masih terdapat sejumlah kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Pertama, sebagian besar literatur masih berfokus pada satu desa

wisata tertentu tanpa menyajikan analisis komparatif lintas-destinasi yang dapat mengungkap pola keberhasilan dan kegagalan secara sistematis (Hariyadi et al., 2024; Merdeka, 2023). Kedua, kajian terdahulu cenderung menekankan dimensi ekonomi atau dimensi sosial-budaya secara terpisah, tanpa kerangka analisis terintegrasi yang mencakup peluang-tantangan-strategi secara holistik. Ketiga, dimensi inovasi berbasis kearifan lokal dan integrasi teknologi digital pada CBT masih kurang dieksplorasi, padahal keduanya menjadi penentu daya saing destinasi pada era ekonomi digital. Keempat, peran kelembagaan lokal seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor CBT belum cukup diteliti dalam konteks tata kelola yang efektif (Pratiwi & Astuti, 2024).

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran strategis CBT sebagai model pemberdayaan masyarakat lokal, memetakan tantangan implementasinya, dan merumuskan strategi penguatan yang adaptif dengan konteks Indonesia. Tiga pertanyaan penelitian dirumuskan: (1) bagaimana karakteristik dan keterkaitan konseptual antara CBT dan pemberdayaan masyarakat; (2) tantangan struktural apa yang paling sering muncul dalam implementasi CBT di Indonesia; serta (3) strategi penguatan seperti apa yang efektif untuk memastikan keberlanjutan dan inklusivitas CBT. Secara teoretis, kajian ini memperkaya literatur pariwisata berkelanjutan Indonesia melalui kerangka peluang-tantangan-strategi yang terintegrasi dengan studi komparatif lintas-desa wisata. Secara praktis, hasil kajian memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah, kelembagaan komunitas, dan masyarakat dalam mengembangkan model CBT yang efektif. Sistematika artikel ini terdiri atas tinjauan pustaka, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan.

Tinjauan Pustaka

Konsep dan Prinsip Community-Based Tourism

Community-Based Tourism (CBT) merupakan pendekatan alternatif dalam pengembangan pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi. CBT berangkat dari gagasan bahwa pembangunan pariwisata tidak semata-mata ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi, melainkan juga untuk mendorong pemberdayaan sosial dan kultural masyarakat setempat (Rahman et al., 2024). Hariyadi et al. (2024) menegaskan bahwa CBT mengedepankan nilai partisipatif, di mana masyarakat diberikan ruang mengambil keputusan kolektif terkait pengembangan potensi wisata di wilayahnya. Hal ini menciptakan distribusi manfaat yang lebih adil dan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap destinasi yang dibangun.

CBT bertumpu pada empat pilar utama: keberlanjutan, partisipasi aktif masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pelestarian nilai-nilai budaya. Wijaya dan Suryani (2024) menambahkan bahwa keberlanjutan dalam konteks CBT mencakup tiga dimensi—ekologis, sosial, dan ekonomi—yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Perbedaan mendasar antara CBT dan pariwisata konvensional terletak pada orientasi dan struktur pengelolaan: pariwisata konvensional cenderung didominasi pihak eksternal seperti investor dengan fokus keuntungan jangka pendek, sedangkan CBT mendorong desentralisasi peran dan memperkuat kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi wisata mereka sendiri (Asy'ari & Putra, 2023).

Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek intervensi program. Konsep ini menekankan peningkatan kapasitas individu dan kolektif untuk mengelola, mengontrol, dan memanfaatkan sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan (Merdeka, 2023). Indikator pemberdayaan dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan, mengakses sumber daya, membangun kelembagaan lokal, serta memperoleh manfaat ekonomi yang adil dari kegiatan pembangunan. Setyawan et al. (2025) memperluas definisi ini dengan mencakup dimensi penguatan usaha mikro, peningkatan pendapatan berbasis potensi lokal, serta pelestarian nilai-nilai budaya sebagai bentuk kemandirian komunitas. Setiawati et al. (2025) menegaskan bahwa komunikasi pembangunan berbasis komunitas, terutama yang melibatkan perempuan dan kelompok rentan, menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesadaran kritis dan partisipasi inklusif.

Keterkaitan CBT dengan Pemberdayaan Masyarakat

CBT secara konseptual dan praktis mengintegrasikan nilai-nilai pemberdayaan ke dalam pengelolaan destinasi wisata. Pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan menciptakan ruang peningkatan kapasitas individu dan kolektif. Pendekatan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro berbasis pariwisata, memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi, serta memperkuat posisi tawar dalam menghadapi dinamika pembangunan (Hariyadi et al., 2024). Rumtutuly et al. (2023) memberikan contoh empiris bagaimana pemberdayaan berbasis pariwisata di Dusun Nyama melalui produksi *Virgin Coconut Oil* (VCO) berhasil meningkatkan kompetensi warga sekaligus mempererat solidaritas sosial. Sebagai alat transformasi, CBT memperkuat struktur sosial melalui pembentukan kelembagaan inklusif seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan koperasi pariwisata yang menjadi ruang belajar dan pengambilan keputusan bersama (Pratiwi & Astuti, 2024).

Studi Lintas Destinasi: Pelajaran dari Asia Tenggara

Studi komparatif lintas destinasi memberikan perspektif penting tentang faktor keberhasilan CBT. Phongsavath dan Boonyanmethaporn (2024) menganalisis pengalaman CBT di Thailand dan Laos serta menemukan bahwa keberhasilan jangka panjang ditentukan oleh tiga faktor: kekuatan kelembagaan komunitas, kualitas pendampingan dari pemerintah dan akademisi, serta kemampuan beradaptasi terhadap pasar wisata yang berubah. Nguyen dan Tran (2024) memperluas analisis dengan studi pada CBT di Vietnam yang menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital pada pemasaran dan pemesanan menjadi pembeda destinasi yang sukses dengan yang stagnan. Untuk konteks Indonesia, Suherlan dan Pratiwi (2024) menggarisbawahi bahwa keragaman budaya dan kearifan lokal menjadi modal struktural yang sulit ditiru destinasi lain di kawasan—sebuah keunggulan yang harus dimanfaatkan secara strategis melalui kerangka kebijakan yang adaptif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif berbasis kajian literatur sistematis (*systematic literature review*/SLR), dilengkapi studi kasus multi-destinasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena CBT dan pemberdayaan masyarakat bersifat multidimensi serta memerlukan eksplorasi mendalam terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan. Aspek deskriptif memetakan kondisi terkini, sedangkan studi kasus empat desa wisata memungkinkan analisis komparatif untuk menemukan pola keberhasilan dan tantangan.

Strategi pencarian literatur dilakukan melalui basis data Scopus, Web of Science, Google Scholar, Sinta Kemdikbudristek, dan portal jurnal nasional terindeks. Kata kunci yang digunakan mencakup kombinasi: *community-based tourism*, CBT, pemberdayaan masyarakat, desa wisata, *sustainable tourism*, *rural tourism*, Pokdarwis, BUMDes, kearifan lokal, dan partisipasi komunitas. Pencarian dilakukan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris untuk memperluas cakupan literatur regional dan internasional.

Kriteria inklusi sumber meliputi: (1) publikasi pada rentang 2023–2026 untuk memastikan relevansi dengan dinamika pasca-pandemi; (2) artikel jurnal terindeks Scopus, Web of Science, atau SINTA 1–3, atau buku akademik bereputasi; (3) topik yang berkaitan langsung dengan CBT, pemberdayaan komunitas, pariwisata berkelanjutan, atau desa wisata; serta (4) ketersediaan teks penuh atau abstrak yang memadai. Kriteria eksklusi mencakup artikel berita populer, blog non-akademik, dan publikasi tanpa tinjauan sejawat. Dari pencarian awal diperoleh sekitar 90 dokumen yang kemudian disaring melalui telaah judul, abstrak, dan teks penuh, sehingga menghasilkan 21 sumber utama.

Teknik analisis data dilakukan melalui empat tahap. Pertama, ekstraksi tematik untuk mengidentifikasi tema utama dari literatur. Kedua, kategorisasi temuan berdasarkan tiga sumbu analisis: peluang, tantangan, dan strategi. Ketiga, sintesis komparatif lintas-destinasi melalui empat studi kasus desa wisata unggulan untuk menemukan pola pengembangan yang efektif. Keempat, interpretasi kritis untuk merumuskan kerangka strategi penguatan terintegrasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber pada setiap argumen kunci. Keterbatasan metodologi adalah ketergantungan pada literatur sekunder tanpa pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi lapangan, sehingga hasil merepresentasikan konsensus literatur akademis terkini, bukan verifikasi empiris langsung pada destinasi tertentu.

Hasil dan Pembahasan

Potensi dan Peluang CBT dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Hasil kajian menunjukkan bahwa CBT memiliki potensi besar sebagai pendekatan inklusif dalam pariwisata karena mendorong partisipasi langsung masyarakat dalam menciptakan pengalaman wisata yang otentik. Hariyadi et al. (2024) menegaskan bahwa keterlibatan komunitas tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan terhadap sumber daya lokal, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian budaya serta penguatan identitas lokal—dua aspek yang menjadi kunci keberlanjutan pariwisata di tengah dinamika globalisasi. Wijaya dan Suryani (2024) menambahkan bahwa CBT mampu menciptakan distribusi manfaat ekonomi yang lebih

merata melalui penciptaan unit usaha lokal seperti homestay, kuliner khas daerah, kerajinan tangan, jasa transportasi, dan pemandu wisata.

Dari perspektif strategis, CBT membuka peluang transformasi tiga lapis. Pada lapis individu, CBT meningkatkan kapasitas warga melalui pelatihan keterampilan teknis (manajemen wisata, pelayanan pelanggan, bahasa asing) dan keterampilan kewirausahaan. Pada lapis kelembagaan, CBT mendorong terbentuknya organisasi komunitas yang kuat seperti Pokdarwis, BUMDes pariwisata, dan koperasi yang menjadi ruang pengambilan keputusan kolektif (Pratiwi & Astuti, 2024). Pada lapis sistem, CBT mengubah relasi kekuasaan antara komunitas, investor, dan pemerintah dengan memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi masyarakat. Setyawan et al. (2025) memperkuat dengan studi yang menunjukkan bahwa transformasi tiga lapis tersebut menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dan ketahanan komunitas terhadap guncangan eksternal seperti pandemi atau resesi pasar wisata.

Studi Kasus Empat Desa Wisata Unggulan

Nglanggeran: model edukasi geowisata berbasis Pokdarwis

Desa Wisata Nglanggeran di Gunungkidul, Yogyakarta, merupakan salah satu contoh sukses implementasi CBT di Indonesia. Hariyadi et al. (2024) memaparkan bahwa Nglanggeran mengandalkan daya tarik Gunung Api Purba dan kegiatan wisata berbasis edukasi, pertanian, dan budaya lokal. Keberhasilan tidak terlepas dari kuatnya partisipasi masyarakat melalui Pokdarwis yang mengelola homestay, pemandu lokal, tiket masuk, dan kegiatan konservasi lingkungan. Model pengelolaan kolektif tersebut meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong lahirnya UMKM berbasis lokal seperti produksi kuliner khas, kerajinan, dan jasa wisata edukasi. Pratiwi dan Astuti (2024) menambahkan bahwa kekuatan kelembagaan Pokdarwis Nglanggeran menjadi salah satu modal sosial terpenting yang memungkinkan keberlanjutan model ini di tengah perubahan generasi pengelola.

Penglipuran: harmonisasi pariwisata dan pelestarian budaya

Desa Penglipuran di Bangli, Bali, dikenal sebagai salah satu desa terbersih di dunia dan menjadi simbol harmonisasi antara pariwisata dan pelestarian budaya. Wijaya dan Suryani (2024) menjelaskan bahwa Desa Penglipuran menerapkan prinsip CBT dengan memanfaatkan kearifan lokal tata ruang desa dan sistem adat Bali (*awig-awig*) untuk mengatur keterlibatan warga dalam pariwisata. Masyarakat tidak hanya menyediakan akomodasi dan pemandu wisata, tetapi juga berperan sebagai penjaga nilai tradisional yang menjadi daya tarik utama. Keberhasilan Penglipuran menunjukkan bahwa kerangka adat yang kuat dapat menjadi mekanisme tata kelola CBT yang efektif, sebuah pelajaran yang relevan untuk destinasi lain dengan tradisi adat yang mengakar.

Wae Rebo: konservasi warisan dan pengelolaan akses

Desa Wae Rebo di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, merupakan contoh CBT yang berhasil menyeimbangkan konservasi warisan budaya (rumah adat *Mbaru Niang*) dengan pengembangan ekonomi pariwisata. Suherlan dan Pratiwi (2024) memaparkan bahwa keterbatasan akses geografis—wisatawan harus berjalan kaki sekitar tiga jam—justru menjadi mekanisme alami untuk mengelola kapasitas kunjungan dan melindungi karakter budaya desa.

Pengelolaan akses oleh komunitas, kuota harian wisatawan, dan tarif yang ditetapkan kolektif memberikan pelajaran penting tentang bagaimana CBT dapat mengintegrasikan prinsip *carrying capacity* dengan kelembagaan adat yang kuat. Model ini relevan untuk destinasi lain dengan warisan budaya yang rentan terhadap komodifikasi pariwisata.

Pentingsari: integrasi agrowisata dan pendidikan

Desa Wisata Pentingsari di Sleman, Yogyakarta, menunjukkan model CBT yang berbasis agrowisata dan pendidikan budaya. Rahman et al. (2024) memaparkan bahwa Pentingsari berhasil mengintegrasikan kegiatan pertanian, kuliner tradisional, dan praktik budaya Jawa ke dalam paket wisata edukasi yang menyasar segmen keluarga, sekolah, dan komunitas. Pendekatan ini menciptakan diferensiasi produk wisata yang jelas sekaligus memberi ruang bagi seluruh lapisan masyarakat—termasuk perempuan, lansia, dan generasi muda—untuk berperan sesuai kapasitas masing-masing. Setiawati et al. (2025) menyoroti bahwa keterlibatan perempuan dalam pengelolaan kuliner dan kegiatan budaya di Pentingsari menjadi salah satu pilar inklusivitas yang memperkuat ketahanan komunitas.

Tabel 1. Sintesis Empat Studi Kasus Desa Wisata Berbasis CBT di Indonesia

Desa Wisata	Daya Tarik Utama	Model Pengelolaan	Pelajaran Strategis
Nglanggeran (Yogyakarta)	Geowisata Gunung Api Purba, edukasi pertanian	Pokdarwis dengan UMKM penunjang	Kelembagaan Pokdarwis sebagai modal sosial
Penglipuran (Bali)	Tata ruang desa adat, kebersihan, budaya Bali	Sistem adat <i>awig-awig</i>	Adat sebagai mekanisme tata kelola CBT
Wae Rebo (NTT)	Rumah adat <i>Mbaru Niang</i> , lanskap pegunungan	Pengelolaan akses dan kuota komunitas	Integrasi <i>carrying capacity</i> dan kelembagaan adat
Pentingsari (Yogyakarta)	Agrowisata, kuliner Jawa, pendidikan budaya	Inklusi lintas-generasi, pelibatan perempuan	Diferensiasi produk dengan inklusivitas peran

Sumber: Disusun dari Hariyadi et al. (2024), Wijaya dan Suryani (2024), Suherlan dan Pratiwi (2024), Rahman et al. (2024), serta Setiawati et al. (2025), diolah.

Tantangan Implementasi CBT di Indonesia

Meskipun CBT menunjukkan keberhasilan di banyak destinasi, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan struktural. Tantangan pertama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lokal. Pratiwi dan Astuti (2024) menemukan bahwa di banyak desa wisata, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola pariwisata masih menjadi hambatan besar. Rendahnya literasi digital, minimnya pengalaman pelayanan wisata, serta keterbatasan akses pelatihan formal menyebabkan banyak pelaku lokal belum optimal dalam mengelola potensi wisata secara profesional. Kelembagaan tingkat desa sering kali belum memiliki struktur yang kuat atau sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Tantangan kedua adalah ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Hariyadi et al. (2024) menyoroti bahwa pada beberapa destinasi, manfaat CBT cenderung terpusat pada kelompok atau individu tertentu yang memiliki akses pada modal, jaringan, atau informasi. Hal ini memunculkan ketegangan sosial dan kecemburuan dalam komunitas, yang pada akhirnya melemahkan solidaritas sosial dan efektivitas pemberdayaan. Wijaya dan Suryani (2024) memperingatkan bahwa tanpa mekanisme distribusi yang adil dan transparan, CBT berisiko mereplikasi pola ketimpangan yang ingin dihindari sejak awal.

Tantangan ketiga adalah ketergantungan pada bantuan eksternal seperti program pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan institusi pendidikan. Ketika inisiatif CBT lebih banyak digerakkan pihak luar tanpa membangun kapasitas internal masyarakat, keberlangsungan program menjadi rapuh. Rahman et al. (2024) menegaskan bahwa pendampingan yang berhasil adalah yang merancang transisi tanggung jawab secara bertahap kepada komunitas, sehingga *sense of ownership* tumbuh seiring pengurangan intervensi eksternal. Tantangan keempat adalah minimnya dukungan regulasi dan kebijakan yang berpihak pada CBT. Asy'ari dan Putra (2023) mencatat bahwa kerangka kebijakan pariwisata di Indonesia masih cenderung berorientasi pada skala besar dan investor, sehingga mengabaikan potensi dan kebutuhan desa wisata berbasis komunitas. Phongsavath dan Boonyanmethaporn (2024) menambahkan bahwa pengalaman regional menunjukkan destinasi yang memiliki kerangka kebijakan khusus untuk CBT mencatat keberlanjutan yang lebih tinggi dibanding yang bergantung pada kebijakan pariwisata umum.

Strategi Penguatan Pengembangan CBT

Hasil sintesis literatur dan studi kasus mengidentifikasi tiga strategi penguatan yang perlu diimplementasikan secara terintegrasi. Strategi pertama adalah pendampingan komunitas dan pelatihan kewirausahaan berkelanjutan. Setyawan et al. (2025) menekankan pentingnya membangun kapasitas masyarakat secara sistematis melalui pelatihan keterampilan manajerial, kewirausahaan, dan pengelolaan potensi wisata desa. Pelatihan tidak boleh bersifat satu-kali (*one-shot*) atau generik, melainkan harus dirancang sebagai proses jangka panjang yang disesuaikan dengan tahap perkembangan komunitas. Setiawati et al. (2025) menambahkan bahwa pendekatan komunikasi pembangunan berbasis komunitas, terutama yang inklusif terhadap perempuan dan kelompok rentan, menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesadaran kritis dan partisipasi yang merata.

Strategi kedua adalah sinergi multipihak antara pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat. Wirata et al. (2023) memaparkan model *quadruple helix* yang menempatkan empat aktor utama dalam relasi kolaboratif yang saling memperkuat: pemerintah memberikan regulasi dan akses pendanaan, akademisi menyumbangkan keilmuan dan pendampingan, lembaga swadaya menjembatani kebutuhan masyarakat dan kebijakan, sedangkan masyarakat menjadi aktor utama yang mengelola dan menjaga keberlangsungan. Nguyen dan Tran (2024) menambahkan bahwa peran sektor swasta sebagai pemberi akses pasar dan dukungan teknologi digital semakin penting pada era ekonomi platform.

Strategi ketiga adalah inovasi berbasis kearifan lokal dan integrasi teknologi digital. Prasetyo dan Nararais (2023) menyatakan bahwa pengembangan destinasi wisata edukatif dan budaya yang menonjolkan kearifan lokal—seperti upacara adat, seni pertunjukan, dan kerajinan

tradisional—dapat memperkuat identitas desa wisata sekaligus meningkatkan daya tarik. Inovasi tidak selalu identik dengan modernisasi; sebaliknya, dapat berupa rekontekstualisasi budaya lokal ke dalam bentuk atraksi wisata yang otentik. Bilan et al. (2024) memberikan bukti empiris bahwa adopsi teknologi digital pada destinasi pariwisata mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal tanpa harus menghilangkan karakter unik destinasi. Sigala (2024) menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi baru dalam pariwisata harus dilakukan dengan pendekatan multi-disiplin yang menempatkan masyarakat sebagai pemilik proses, bukan sekadar penerima manfaat. Pratama dan Wijaya (2024) menunjukkan melalui studi UMKM pariwisata Yogyakarta bahwa transformasi digital sederhana—seperti pemanfaatan media sosial, sistem pemesanan daring, dan dokumentasi visual—mampu meningkatkan pendapatan rata-rata 23% dalam dua tahun pertama. Suherlan dan Pratiwi (2024) menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi digital seperti situs web desa wisata, media sosial, dan platform pemesanan menjadi pelengkap penting untuk memperluas jangkauan pasar tanpa menggerus karakter lokal yang menjadi keunggulan kompetitif.

Sintesis dan Implikasi Strategis bagi Pemangku Kepentingan

Sintesis hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan CBT di Indonesia terbentuk dari interaksi antara tiga elemen: kelembagaan komunitas yang kuat, pendampingan berkelanjutan yang adaptif, dan inovasi berbasis kearifan lokal. Empat studi kasus yang dianalisis mengonfirmasi bahwa tidak ada satu model tunggal yang dapat direplikasi secara seragam—setiap destinasi memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan konteks budaya, geografis, dan sosial-ekonomi masing-masing.

Implikasi strategis kajian ini bersifat multipihak. Bagi pemerintah pusat, prioritas adalah merumuskan regulasi yang spesifik untuk CBT, mencakup pengakuan legalitas kelembagaan desa wisata, penyederhanaan izin usaha, insentif fiskal bagi UMKM pariwisata, dan perlindungan terhadap praktik komodifikasi budaya yang berlebihan. Bagi pemerintah daerah, peluang terbuka untuk mengkurasi paket pengembangan yang sesuai dengan keunikan budaya dan geografi masing-masing—seperti yang dicontohkan oleh Bali, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur. Kasus desa wisata berbasis *wellness* dan ekowisata di Desa Padusan, Mojokerto, juga memberikan ilustrasi tambahan tentang bagaimana CBT dapat dikombinasikan dengan tema khusus seperti kesehatan dan konservasi (Insani et al., 2024). Sujana (2025) menyoroti bahwa strategi pemberdayaan komunitas pada destinasi wisata berbasis budaya menjadi pembeda kompetitif yang sulit ditiru destinasi lain. Bagi pelaku komunitas, peluang ada pada pembentukan dan penguatan kelembagaan seperti Pokdarwis dan BUMDes pariwisata yang menjadi motor pengelolaan profesional. Bagi institusi pendidikan tinggi pariwisata, kontribusi dapat diberikan melalui penyediaan pendamping akademis, riset terapan yang relevan dengan kebutuhan desa wisata, serta pembaruan kurikulum yang mencakup kompetensi manajemen CBT, fasilitasi komunitas, dan literasi keberlanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Community-Based Tourism* merupakan pendekatan strategis yang efektif sebagai model pemberdayaan masyarakat lokal di Indonesia. CBT mampu mendorong transformasi pada tiga lapis—individu, kelembagaan, dan sistem—yang secara kolektif menciptakan kemandirian ekonomi, penguatan identitas budaya, dan ketahanan

komunitas terhadap guncangan eksternal. Empat studi kasus desa wisata unggulan—Nglanggeran, Penglipuran, Wae Rebo, dan Pentingsari—memberikan pelajaran komplementer tentang bagaimana CBT dapat diadaptasi dengan keunikan konteks geografis, budaya, dan sosial masing-masing destinasi.

Empat tantangan struktural perlu diatasi secara serentak: keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketimpangan distribusi manfaat ekonomi, ketergantungan pada bantuan eksternal, dan minimnya dukungan regulasi yang berpihak. Tiga strategi penguatan yang teridentifikasi—pendampingan berkelanjutan dan pelatihan kewirausahaan, sinergi multipihak antar pemangku kepentingan, serta inovasi berbasis kearifan lokal yang dilengkapi integrasi teknologi digital—harus diimplementasikan secara terintegrasi. Kegagalan pada satu strategi akan menggerus efektivitas strategi lain, sehingga pendekatan holistik menjadi keniscayaan. Implikasi teoretis kajian adalah pentingnya kerangka analisis terintegrasi peluang-tantangan-strategi yang menggabungkan perspektif kelembagaan, ekonomi, sosial-budaya, dan kebijakan. Implikasi praktisnya adalah perlunya kolaborasi multipihak yang dilandasi prinsip keadilan distribusi, transparansi tata kelola, dan komitmen jangka panjang.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan literatur sekunder tanpa wawancara langsung dengan pengelola desa wisata dan masyarakat lokal. Penelitian lanjutan disarankan melakukan studi lapangan dengan pendekatan etnografi pada beberapa desa wisata, analisis kuantitatif terhadap dampak ekonomi *multiplier* CBT, evaluasi efektivitas kelembagaan Pokdarwis dan BUMDes pada berbagai tingkat kematangan, serta studi komparatif lintas-negara ASEAN untuk memperluas generalisasi temuan dan menemukan praktik terbaik yang dapat diadaptasi. Pernyataan konflik kepentingan: para penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

Asy'ari, R., & Putra, R. R. (2023). Bibliometric: Pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 10(1), 19–30.

Hariyadi, B. R., Rokhman, A., Rosyadi, S., Yamin, M., & Runtiko, A. G. (2024). The role of community-based tourism in sustainable tourism village in Indonesia. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(7), 1–24. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n7-080>

Merdeka, P. H. (2023). Manajemen peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan usaha lokal masyarakat: A review. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business*, 1(1), 1–9.

Nguyen, T. H., & Tran, V. K. (2024). Digital integration in community-based tourism: Lessons from rural destinations in Vietnam. *Tourism Management Perspectives*, 51, 101225. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2024.101225>

Phongsavath, S., & Boonyanmethaporn, W. (2024). Comparative analysis of community-based tourism governance in Thailand and Laos: Institutional and policy dimensions. *Asia*

Pacific Journal of Tourism Research, 29(6), 678–695.
<https://doi.org/10.1080/10941665.2024.2356712>

Prasetyo, H., & Nararais, D. (2023). Urgensi destinasi wisata edukasi dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di Indonesia. *Kepariwisataan: Jurnal Ilmiah*, 17(2), 135–143.

Pratiwi, S. R., & Astuti, R. (2024). Penguatan kelembagaan Pokdarwis dan BUMDes dalam tata kelola desa wisata berkelanjutan. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 19(2), 98–115.

Rahman, A., Setiawan, B., & Hidayati, R. (2024). Community-based tourism as an instrument for sustainable rural development: Evidence from Indonesian tourism villages. *Sustainability*, 16(14), 5987. <https://doi.org/10.3390/su16145987>

Rumtutuly, F., Keipau, D., Ngilamele, N., Louk, R., Peraso, A., Koupun, R., & Makatita, J. (2023). Pemberdayaan masyarakat lokal melalui produksi *Virgin Coconut Oil* di Dusun Nyama, Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi*, 2(3), 78–86.

Setiawati, H., Firmansyah, I., Salsabila, R. M., & Purwanto, E. (2025). Komunikasi pembangunan berbasis komunitas dalam upaya pemberdayaan perempuan. *Interaction Communication Studies Journal*, 1(4), 20–34.

Setyawan, A. A., Desembrianita, E., Santoso, M. H., & Kalalo, R. R. (2025). Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi lokal: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1494–1503.

Suherlan, A., & Pratiwi, M. (2024). Kearifan lokal dan tata kelola akses pada destinasi *Community-Based Tourism*: Studi pada Desa Wae Rebo, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Pariwisata*, 6(1), 45–62.

Wijaya, S., & Suryani, A. P. (2024). Adat governance and sustainable community-based tourism: Insights from Penglipuran, Bali. *Tourism, Culture & Communication*, 24(3), 245–262. <https://doi.org/10.3727/109830424X16985745>

Wirata, G., Handayani, M. M., & Geriadi, M. A. D. (2023). Kebijakan pengembangan ekowisata berbasis komunitas di Indonesia: Sebuah pendekatan *quadruple helix*. *JPPI: Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 9(4), 16–23.

Bilan, Y., Tovmasyan, G., & Dallakyan, S. (2024). The impact of digital technologies on tourism development. *Journal of International Studies*, 17(2), 217–234.
<https://doi.org/10.14254/2071-8330.2024/17-2/13>

Ernawati, H., & Hananto, K. (2023). Pariwisata digital: Perspektif dan agenda riset masa depan. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 8(2), 145–158. <https://doi.org/10.26905/jpp.v8i2.10215>

Insani, N., Anggraeni, F. D., Pradana, B. A., & Setyawan, D. (2024). Pengembangan desa wisata berbasis *wellness* dan ekowisata di Desa Padusan, Mojokerto. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 9(1), 28–45.

Mariati, S., Gilitasha, A., Rahmanita, M., Djati, S. P., & Adawiyah, R. (2023). Sustainable tourism destination development for community-based participation. *Technium Social Sciences Journal*, 43, 403–418.

Pratama, A. M., & Wijaya, S. (2024). Transformasi digital agen perjalanan wisata UMKM di era pasca-pandemi: Studi kasus Yogyakarta. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 19(2), 134–151.

Sigala, M. (2024). New technologies in tourism: From multi-disciplinary to anti-disciplinary advances. *Tourism Management Perspectives*, 49, 101170.
<https://doi.org/10.1016/j.tmp.2023.101170>

Sujana, B. Z. T. (2025). Strategi pemberdayaan komunitas pada destinasi wisata berbasis budaya di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pariwisata*, 7(1), 23–38.